

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mayoritas penduduk Indonesia kini tinggal di perkotaan, alih-alih pedesaan, berkat kemajuan teknologi informasi. Penggunaan ponsel pintar (*smartphone*) semakin umum dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua interaksi dan komunikasi, baik melalui media sosial maupun seluler, dilakukan melalui ponsel pintar. Berkat konektivitas internetnya, ponsel pintar menjadi bagian tak terpisahkan dari hampir setiap aktivitas sehari-hari. Orang-orang menggunakan ponsel pintar untuk berbagai keperluan, seperti menelepon, mengirim *sms* (*short message service*), bercakap-cakap di media sosial, berbisnis, dan melakukan transaksi keuangan *online*.¹

Di dunia digital saat ini, transaksi keuangan menjadi mudah. Manusia dituntut oleh era global untuk terus mengembangkan teknologi yang memudahkan atau bahkan menggantikan pekerjaan manusia, seperti dalam transaksi keuangan. Perkembangan instrumen pembayaran semakin pesat seiring dengan kemajuan teknologi sistem pembayaran saat ini. Dengan berbagai kemajuan yang membuatnya lebih efektif, aman, cepat, dan nyaman digunakan, penggunaan teknologi modern sebagai metode pembayaran nontunai telah berkembang pesat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

¹ Decky Hendarsyah, 'Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5.1 (2016), 1–15 <<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v5i1.74>>.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi, sebuah teori baru yang disebut *Technology Acceptance Model* (TAM) pertama kali dikembangkan pada tahun 1986 oleh Davis, Bagozzi, dan Warshaw. TAM diciptakan untuk mengkaji dan memahami variabel-variabel yang dapat memengaruhi kelayakan suatu teknologi. Menurut TAM, persepsi akan manfaat dan kegunaan suatu teknologi akan memengaruhi niat pengguna untuk memanfaatkannya. Tujuan ini kemudian memengaruhi bagaimana suatu teknologi benar-benar digunakan. Ditemukan bahwa dua faktor substansial dan krusial yang memengaruhi pemanfaatan suatu teknologi adalah persepsi akan keunggulannya dan kemudahan penggunaannya.²

Bank syariah sangat penting bagi perkembangan perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Karena bank merupakan salah satu lembaga yang berfungsi sebagai perantara keuangan, yang bertugas mempertemukan pihak-pihak yang kelebihan dana dan pihak-pihak yang kekurangan dana, hampir setiap industri yang terlibat dalam aktivitas keuangan membutuhkan layanan perbankan. Karena bank syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, mereka harus berfungsi sebagai lembaga perantara selain sebagai perantara keuangan. Pasal 4 tentang Perbankan Syariah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa bank syariah wajib berperan sebagai lembaga intermediasi di samping tugas pokoknya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sebagai lembaga baitul maal, bank syariah juga dapat menjalankan tugas sosial dengan menyalurkan dana zakat,

² Fred D. Davis, 'Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology', *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 13.3 (1989), 319–39 <<https://doi.org/10.2307/249008>>.

hibah, sadaqah, infaq, dan dana sosial lainnya kepada kelompok pengelola zakat.³

Saat ini Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya muslim mulai kian tumbuh berkembang sektor perbankan syariah, sejalan dengan trend tersebut, saat ini industri perbankan syariah secara aktif meluncurkan media digital mulai dari *website* hingga aplikasi mobile sebagai media penawaran berbagai produk dan layanan mereka yang dapat memudahkan nasabah dalam mengakses cukup melalui *smartphone* genggam.

Perbankan Syariah dan layanan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saling terkait erat. Berdasarkan hubungan ini, Bank Syariah harus menyediakan produk yang memenuhi kebutuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, yang sebenarnya merupakan *low income people*. Bank syariah memainkan peran yang lebih besar dalam operasionalnya dibandingkan bank konvensional. Secara spesifik, mereka dapat menggunakan dana sosial dari Infaq, Shadaqoh, dan Zakat untuk mendukung kebutuhan modal usaha mikro dan kecil serta mengurangi kemiskinan dengan menawarkan bagi hasil atau margin yang terjangkau.⁴

Perbankan Syariah merupakan lembaga yang sangat penting di Indonesia, jika dilihat dari tujuannya perbankan syariah diharapkan dapat menawarkan maslahat bagi perekonomian Indonesia. Selain itu, bank syariah harus menawarkan produk yang mendukung para wirausaha, baik usaha mikro, kecil, maupun

³ Nur Afifah and Peni Haryanti, 'Hakikat Peran Intermediasi Bank Syariah Bagi Masyarakat Pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang', *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 2.3 (2021), 160–73 <<https://doi.org/10.33752/jies.v2i3.420>>.

⁴ Lucky Nugroho and Dewi Tamala, 'Persepsi Pengusaha Umkm Terhadap Peran Bank Syariah', *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3.1 (2018), 49–62 <<https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i1.115>>.

menengah, agar mereka dianggap membantu mengurangi kemiskinan dan memberikan maslahat bagi perekonomian Indonesia.

Sektor usaha utama dalam perekonomian Indonesia terdiri dari usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Dalam perekonomian modern, uang adalah segala sesuatu yang mudah diakses dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk barang, jasa, dan aset berharga lainnya.⁵

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang menjadi fondasi perekonomian Indonesia. Berkat kontribusinya yang substansial terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, dan pembentukan PDB, UMKM menjadi peran penting di sektor komersial dan industri. Pada tahun 2021 dan 2022, sektor UMKM masing-masing menyumbang 61,07% dan Rp8.574 triliun dari PDB, serta 60,5% dan Rp9.580 triliun.⁶

UMKM sangat penting bagi pemulihan ekonomi Indonesia karena berkontribusi signifikan terhadap PDB negara. Hal ini dibuktikan dengan dedikasi pemerintah dalam membantu UMKM berkembang dalam menghadapi perubahan teknologi digital melalui inisiatif Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).⁷ Komitmen pemerintah Indonesia terhadap UMKM ditunjukkan melalui inisiatif seperti Kredit

⁵ Riza Hardianti Utari and others, 'Ciptaan Disebarluaskan Di Bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional. Persepsi Belanja Menggunakan Aplikasi E-Wallet (Studi Pada Pengguna E-Wallet Dana Di Indonesia)', *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*. (Printed), 5.1 (2021), 215–26 <<http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar>>.

⁶ Kementerian koordinator bidang perekonomian republik Indonesia (2021), 'UMKM Menajdi Pilar Penting Dalam Perekonomian Indonesia' <www.ekon.go.id>. Diakses pada 17 Februari 2025

⁷ Y. R Pratiwi, 'Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19' <www.djkn.kemenkeu.go.id>. di akses 17 Februari 2025

Usaha Rakyat (KUR), Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI), digitalisasi pemasaran UMKM, dan menawarkan bantuan keuangan.⁸

Di Indonesia, pemberdayaan UMKM merupakan salah satu komitmen pemerintah. Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM, subsidi bunga (KUR dan non-KUR), penempatan dana pemerintah di bank umum mitra untuk mendukung ekspansi kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, serta pembebasan biaya rekening minimum, biaya administrasi, dan listrik hanyalah beberapa stimulus yang dapat diterima UMKM pada tahun 2021 melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang memiliki alokasi anggaran sebesar Rp96,21 triliun.⁹

UMKM terkadang juga kurang mendapatkan dukungan modal dari lembaga non perbankan dikarenakan beberapa hal diantaranya kelayakan usaha yang dijalankan, kemudian jaminan yang diajukan tidak setara dengan pinjaman, atau legalitas dari usaha tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut maka memanfaatkan jasa dan produk yang disediakan bank syariah menjadi salah satu alternatif pelaku usaha dalam mendapatkan modal.

Informasi mengenai pemanfaatan bank syariah lain oleh UMKM merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama pandemi COVID-19. UMKM menyumbang 61% PDB dan dapat menyerap 97% lapangan kerja di negara ini.¹⁰ UMKM menjadi prioritas dalam rencana agenda

⁸ Anindita Trinura Novitasari, 'Kontribusi Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah', *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 9.2 (2022), 184 <<https://doi.org/10.30998/jabe.v9i2.13703>>.

⁹ kementerian koordinator bidang perekonomian republik Indonesia, 'Dukungan Program Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Untuk Memperkuat Stabilitas Ekonomi Daerah', 2022 <www.ekon.go.id>. diakses 17 Februari 2025 pukul 14.00 WIB

¹⁰ *Opcit*, kementerian koordinator bidang perekonomian republik Indonesia. 'Dukungan Program Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Untuk Memperkuat Stabilitas Ekonomi Daerah', 2022 <www.ekon.go.id>. diakses 17 Februari 2025 pukul 14.00 WIB

pembangunan ekonomi di Indonesia di masa depan karena mampu bertahan dibandingkan sektor lainnya di masa pandemi *Covid-19* sekaligus sebagai penyangga perekonomian Indonesia serta memberikan peluang kerja yang terbuka dan berkualitas.¹¹

Tidak diragukan lagi, setiap usaha yang mapan mendambakan keberlanjutan. Mencapai keberlanjutan usaha membutuhkan waktu. Pencapaian keberlanjutan usaha membutuhkan proses. Keberlanjutan usaha merupakan prasyarat bagi pertumbuhan dan pelestarian sumber daya perusahaan, yang memungkinkan setiap individu untuk menemukan solusi bagi kebutuhan saat ini dan masa depan. Sebagaimana ditunjukkan oleh cara perusahaan memenuhi kebutuhan nasabahnya, keberlanjutan usaha merupakan prasyarat bagi ketahanan bisnis, yang pada gilirannya akan membawa kesuksesan bisnis dalam menghadapi persaingan.¹²

Selain itu, UMKM didorong oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk menjadi pilar utama perekonomian nasional. Untuk itu, OJK terus mendukung ekspansi UMKM serta pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia.¹³

Keberlanjutan UMKM merupakan salah satu perhatian utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Faktor utamanya adalah percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang melibatkan pemerintah dalam

¹¹ Rayon Yolanda Averina And I Gst. Ngurah Jaya Agung Widagda, 'Pengaruh Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Umkm Di Sidoarjo', *Tjybyb.Ac.Cn*, 27.2 (2021), 635–37.

¹² Fitri Lukiastruti and Novi Riza Rosani, 'Pengaruh Pengelolaan Risiko Dan Perilaku Inovatif Terhadap Keberlangsungan Usaha Umkm Yang Dimoderasi Oleh Kapabilitas Jejaring', *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 4.2 (2022), 199–220 <<https://doi.org/10.35829/econbank.v4i2.246>>.

¹³ Otoritas jasa Keuangan, 'OJK Dorong UMKM Menjadi Pilar Utama Perekonomian Nasional.', 2024 <www.ojk.go.id>. diakses pada 17 Februari 2025 pukul 14.49 WIB

menyediakan berbagai layanan untuk mendorong keberlanjutan usaha. UMKM dianggap layak jika mereka sesekali berekspansi.¹⁴

Pelaku usaha dianggap perlu memiliki literasi keuangan untuk mencapai keberlanjutan perusahaan. Kemampuan mengelola keuangan pribadi atau bisnis, membuat keputusan keuangan, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan keuangan merupakan komponen literasi keuangan. Pertumbuhan pendapatan dipengaruhi oleh perkembangan sektor UMKM. UMKM masih menghadapi sejumlah kendala, seperti masalah pendanaan, kepemilikan, kapasitas sumber daya manusia, dan hal-hal lainnya, yang menyebabkan keterlambatan dan mempersulit mereka bersaing dengan perusahaan yang lebih besar. Oleh karena itu, literasi keuangan sangat penting bagi pelaku UMKM. Pertumbuhan pengetahuan keuangan juga akan mendukung keberlangsungan bisnis jika dikelola dengan tepat.¹⁵

Salah satu dari banyak sektor yang telah berubah akibat pesatnya perkembangan teknologi adalah sektor keuangan. Munculnya *fintech*, atau teknologi finansial, merupakan salah satu perkembangan dalam industri keuangan. *Fintech* merupakan jenis teknologi yang berkaitan dengan jasa keuangan; menyediakan layanan seperti alat peminjaman dan aplikasi untuk transaksi pembayaran. *Fintech* memberikan masyarakat cara baru untuk mengembangkan usaha ekonomi mereka secara lebih sukses dan ekonomis. UMKM dapat memperoleh manfaat dari pemanfaatan teknologi dalam layanan keuangan. Namun,

¹⁴ Yusar Sagara and others, 'The Strategic Role of MSME Challenges in the Covid-19 Situation', *Annals of R.S.C.B.*, 25.4 (2021), 4833–43 <<http://annalsofrscb.ro>>.

¹⁵ N P Imaniar and Manasse Siahaan, 'Analisis Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlangsungan UMKM Tapis Lampung', *Jurnal PUSDANSI*, 1.2 (2021), 1–10 <<http://pusdansi.org/index.php/pusdansi/article/view/32>>.

bagi masyarakat Indonesia yang belum mampu beradaptasi dengan perubahan kegiatan ekonomi, kemunculan *fintech* justru menimbulkan *disrupsi* yang kreatif.¹⁶

Karena masih dalam tahap awal, UMKM sering kali kesulitan memperoleh pendanaan dan memiliki lebih sedikit sumber daya dibandingkan perusahaan besar. Ketersediaan layanan keuangan, seperti rekening giro, kredit, pembayaran, atau asuransi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, dikenal sebagai inklusi keuangan. Mayoritas perusahaan memulai dengan pendanaan dari teman, keluarga, dan kerabat, serta sumber daya mereka sendiri.

Namun, dibutuhkan banyak uang untuk berinovasi dan mengembangkan perusahaan. Untuk memastikan perusahaan mereka berkelanjutan, sumber daya keuangan lembaga keuangan tersedia bagi wirausahawan. Telah terbukti bahwa kinerja keuangan UMKM meningkat ketika mereka mengadopsi teknik dan layanan inklusi keuangan.¹⁷

Modal besar dalam suatu usaha adalah salah satu faktor penting dan sangat menentukan jalan atau stagnasinya usaha tersebut, pelaku usaha yang memiliki modal besar dapat berjalan sendiri dan bisa melakukan usahanya secara mandiri, berbeda dengan pelaku usaha yang tidak mempunyai modal ataupun keterbatasan modal akan lebih cenderung mencari pihak kedua sebagai pihak pembantu dalam mendanai modal usaha. Namun, mungkin sulit untuk memenuhi persyaratan uang

¹⁶ Ikhwani; Alkadri Kusalendra Siharis B. Rahardjo, Budi; Khairul, 'Pengaruh Financial Technology (Fintech) Terhadap Perkembangan UMKM Di Kota Magelang', *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Papers, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar*, 2019, 347–56.

¹⁷ Rinaldi Maulana, Rochiyati Murniningsih, and Wahyu Anggit Prasetya, 'Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Dan Fintech Terhadap Keberlangsungan Bisnis Umkm', *Procuratio : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 10.4 (2022), 440–52 <<https://doi.org/10.35145/procuratio.v10i4.2700>>.

dalam jumlah besar dalam waktu singkat, terutama jika Anda harus menggunakan organisasi selain bank.¹⁸ Selain itu, jika uang yang dibutuhkan relatif minimal, uang tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui pinjaman dari teman, keluarga, dan lembaga keuangan lainnya. namun juga tidak sedikit orang harus menjual beberapa harta berharga mereka demi di jadikan sebagai modal usaha, sehingga mereka harus kehilangan barang-barang berharga tanpa bisa kembali ke tangan pemilik.¹⁹

Pertumbuhan inklusi keuangan diperkirakan akan mendorong pemberdayaan UMKM, terutama bagi mereka yang menggunakan jasa bank syariah. Dari lebih dari 60 juta UMKM, hanya 30% yang telah menggunakan layanan keuangan bank, menurut OJK. UMKM tidak mendapatkan perhatian yang memadai karena bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan atau menyalurkan pinjaman kepada nasabah.²⁰

Salah satu bentuk pembangunan ekonomi daerah adalah perluasan sektor riil, atau sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu daerah di Sumatera Barat dengan konsentrasi UMKM terbesar adalah Kabupaten Agam. Dengan banyaknya UMKM yang bergerak di sektor perdagangan, pertanian, dan industri kreatif, Kabupaten Agam memiliki potensi ekonomi yang substansial. Di sektor ini, bank syariah berkontribusi dengan menawarkan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan hukum syariah, termasuk pembiayaan murabahah dan

¹⁸ R. ajeng Entaresmen and Nuraini Chaniago, 'Strategi Dan Prospek Pegadaian Syariah Bagi Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah', *Media Ekonomi*, 30.1 (2022), 57–70 <<https://doi.org/10.25105/me.v30i1.9998>>.

¹⁹ Sri Hartati, 'Eksistensi PT.Pegadaian (PERSERO) Cabang Pelawan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam' (Pekambaru, UIN RIAU, 2016).

²⁰ Novia Yusfiyanti Laili and Rohmawati Kusumaningtias, 'Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyoy)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.3 (2020), 436 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1204>>.

mudhrabah. Namun, masih terdapat kekurangan data akurat mengenai jumlah UMKM di Kabupaten Agam yang menggunakan jasa Bank Syariah, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut.

Di Sumatera Barat, salah satu daerah yang banyak UMKM adalah Kabupaten Agam. Perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Agam menurut Kecamatan dari tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah UMKM Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam
Tahun 2022 – 2023

No	Nama Kecamatan	Tahun	
		2022	2023
1	Tanjung Mutiara	333	340
2	Lubuk Basung	619	630
3	Ampek Nagari	77	83
4	Tanjung Raya	325	337
5	Matur	743	751
6	IV Koto	900	911
7	Malalak	59	68
8	Banuhampu	916	927
9	Sungai Pua	313	319
10	Ampek Angkek	1.382	1.404
11	Canduang	136	142
12	Baso	327	335
13	Tilatang Kamang	726	737
14	Kamang Magek	188	202
15	Palembayan	290	298
16	Palupuh	269	275
Total Kabupaten Agam		7.603	7.759

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam (2024)²¹

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam, jumlah UMKM terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa

²¹ badan pusat statistik kabupaten Agam, ‘Jumlah Industri Kecil Dan Tenaga Kerja Menurut Kecamatan 2023’, 2024 <<https://agamkab.bps.go.id>>. diakses pada 17 Februari 2025 pukul 14.44 WIB.

jumlah UMKM di Kabupaten Agam naik dari tahun 2022 sebanyak 7.603 menjadi 7.759 pada tahun 2023. Jika dilihat dari masing-masing kecamatan secara keseluruhan jumlah UMKM mengalami kenaikan dari tahun 2022 ke tahun 2023.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masing-masing kecamatan memiliki keberlanjutan UMKM yang dibuktikan dengan peningkatan jumlah UMKM sehingga UMKM tersebut mampu mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya agar tetap berlanjut di tengah persaingan usaha yang ketat saat ini. Berkembangnya UMKM yang menggunakan Bank syariah akan meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan demi kebaikan masyarakat. Meskipun UMKM secara umum memiliki keunggulan, mereka masih menghadapi sejumlah kendala pertumbuhan, termasuk kurangnya modal, rendahnya tingkat pendidikan atau keterampilan, terbatasnya akses terhadap informasi dan teknologi, serta kurangnya tenaga kerja terampil atau sumber daya manusia. Semua hal ini dapat menyulitkan upaya membangun keberlangsungan usaha.

Dampak inklusi keuangan, *Financial Technology*, dan literasi keuangan terhadap keberlanjutan UMKM telah menjadi subjek penelitian. Hasil penelitian Budyastuti tentang hubungan *Financial Technology*, literasi keuangan, dan keberlanjutan usaha menunjukkan bahwa kedua elemen tersebut tidak saling berkaitan.²² Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Yuningsih dkk tentang Dampak *Financial Technology* dan Literasi Keuangan terhadap Keberlanjutan

²² Triyani Budyastuti, 'Pengaruh Financial Technology Dan Literasi Keuangan Terhadap Keberlangsungan Usaha', *Jurnal Online Insan Akuntan*, 6.Desember (2021), 169–70 <<https://www.neliti.com/publications/431668/pengaruh-financial-technology-dan-literasi-keuangan-terhadap-keberlangsungan-usa>>.

Usaha Pelaku UMKM yang menemukan bahwa baik *Financial Technology* maupun literasi keuangan memiliki dampak terhadap keberlangsungan usaha jangka panjang para pelaku UMKM.²³

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena masalah di atas, peneliti tertarik untuk menguji secara empiris masalah penelitian dengan judul **“Pengaruh Literasi Keuangan, *Financial Technology* dan Inklusi Keuangan terhadap Keberlanjutan Usaha Nasabah UMKM yang menggunakan Bank Syariah di Kabupaten Agam”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun batasan masalah dalam penelitian ini agar tidak terjadinya pembahasan secara meluas, maka penulis memfokuskan pembahasan yang akan diteliti adalah Sampel penelitian adalah UMKM yang menggunakan Bank Syariah di 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Agam yaitu Ampek Angkek, Banuhampu, IV Koto, Matur dan Tilatang Kamang. Alasan mengambil 5 Kecamatan tersebut adalah karena melihat dari jumlah UMKM terbanyak per kecamatannya.

C. Rumusan Masalah

Mengingat konteks masalah yang telah disebutkan, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keberlanjutan UMKM yang menggunakan Bank Syariah di Kabupaten Agam ?

²³ Yuyun Yuniati Yuningsih, Galih Raspati, and Andi Riyanto, ‘Pengaruh Literasi Keuangan Dan Financial Technology Terhadap Keberlangsungan Usaha Pelaku UMKM’, *Mirai Management*, 7.2 (2022), 531–40.

2. Bagaimana Pengaruh *Financial Technology* terhadap Keberlanjutan UMKM yang menggunakan Bank Syariah di Kabupaten Agam ?
3. Bagaimana Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Keberlanjutan UMKM yang menggunakan Bank Syariah di Kabupaten Agam ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keberlanjutan UMKM yang menggunakan Bank Syariah di Kabupaten Agam
2. Untuk mengetahui Pengaruh *Financial Technology* terhadap Keberlanjutan UMKM yang menggunakan Bank Syariah di Kabupaten Agam
3. Untuk mengetahui Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Keberlanjutan UMKM yang menggunakan Bank Syariah di Kabupaten Agam

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian masa depan diharapkan mendapat manfaat dari studi ini, khususnya di bidang inklusi keuangan, *financial technology*, dan literasi keuangan yang berkaitan dengan keberlanjutan UMKM yang menggunakan bank syariah.

2. Manfaat Praktis

Pihak- pihak yang memperoleh manfaat secara langsung adalah :

- a. Bagi Peneliti

Sebagai implementasi teori yang diterima diperkuliahan terhadap

fenomena lapangan tentang Literasi Keuangan, *Financial Technology* dan Inklusi Keuangan terhadap Keberlanjutan UMKM yang menggunakan Bank Syariah.

b. Bagi Pelaku UMKM

Sebagai lebih banyak informasi dan pemahaman tentang pentingnya memahami elemen-elemen yang memengaruhi keberlanjutan UMKM baik saat ini maupun di masa mendatang.

c. Bagi peneliti Selanjutnya

Sebagai rujukan dan bahan referensi untuk penelitian yang relevan dan dapat meneliti variabel lain yang mempengaruhi keberlanjutan UMKM.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Skripsi ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan membahas tentang deskripsi teori *financial literacy* atau Literasi Keuangan, *financial technology* dan Inklusi Keuangan terhadap Keberlanjutan nasabah UMKM yang menggunakan Bank Syariah , serta penelitian yang relevan, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis penelitian serta hubungan antar variabel.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskriptif objek penelitian, analisis data dan pembahasan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran terkait pengaruh latar belakang.

